



## **BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
21. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Barito Kuala.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi PKD adalah tim yang memfasilitasi pembinaan keuangan desa dari Tingkat Kecamatan.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Kuala setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan bagian dari APBDesa.

### Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar [Rp. 94.111.031.050,00](#) (sembilan puluh empat milyar seratus sebelas juta tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).

## BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

### Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa; dan
  - c. Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).
- (4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dan memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2023 masing-masing bagi 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kecepatan dan ketepatan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa masing-masing bagi 5 (lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADD_x = ADDBP_x + ADDP_x + ADDK_x$$

- ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDBP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
- ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- ADDK<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Kinerja untuk Desa x

- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDP_x = \frac{BD_x}{\sum BD} \times (ADDP)$$

- ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
- BD<sub>x</sub> = Nilai Bobot Desa x
- ∑ BD = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
- ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BD_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + ...+ a_n.KV_{nx}$$

- BD<sub>x</sub> = Nilai Bobot Desa x
- a<sub>1</sub>,a<sub>2</sub>,...,a<sub>n</sub> = Angka Bobot masing-masing Variabel
- KV = Koefisen Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Pasal 7

- (1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang wajib dianggarkan pada pendapatan APBDesa tahun 2024.

- (2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka APBDesa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN

##### Pasal 8

- (1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b. Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah;
  - c. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - d. Penerimaan lain-lain Perangkat Desa yang sah;
  - e. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
  - g. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi BPD;
  - h. Penyediaan operasional BPD;
  - i. Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Staf Desa;
  - j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - k. Dukungan pelaksanaan pembangunan Program Rumah Sehat untuk Rakyat;
  - l. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Warga
  - m. Penyediaan tunjangan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - n. Seleksi Perangkat Desa;
  - o. Penyelenggaraan Lomba Desa;
  - p. Penyediaan Operasional Penegakan dan Penetapan Batas Batas Desa;
  - q. Penyediaan Operasional Pengamanan Aset Desa; dan
  - r. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/ Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dapat dipenuhi dari sumber dana selain ADD.

##### Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.



BAB V  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
  - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
  - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II, Laporan BUMDesa dan Laporan Aset Desa dari Aplikasi Sipades Tahun 2023.
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
  - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
  - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
  - e. pakta integritas (bermaterai); dan
  - f. surat pernyataan penggunaan ADD

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
  - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
  - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
  - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
  - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
  - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
  - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
  - e. pakta integritas (bermaterai);
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
  - g. print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2024 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran ADD.

- (7) Tim Fasilitasi PKD Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
  - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. masalah yang dihadapi; dan
  - c. hasil akhir penggunaan ADD.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kas.
  - c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh :
    1. Dinas PMD membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
    2. Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
    3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.

- (3) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2023 dapat digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah dilaporkan ke Dinas PMD.
- (2) Kaur Keuangan wajib memungut pajak-pajak Negara dan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan pungutan pajak Negara ke Kas Negara dan pajak Daerah ke Kas Daerah.
- (3) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada minggu ke empat bulan Desember wajib disetorkan kembali ke RKD.
- (4) Kegiatan pembangunan fisik desa setiap tahapan penyaluran ADD dilaksanakan foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %;
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain;
- (6) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2024
- (3) Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala.
  - b. mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
  - c. mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas PMD.
  - d. pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
  - e. pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

## Pasal 19

Format kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan surat pertanggungjawaban Desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, surat pengantar dari Desa ke Dinas PMD, surat permohonan pencairan ADD, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan, surat pernyataan penggunaan ADD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, pakta integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 20

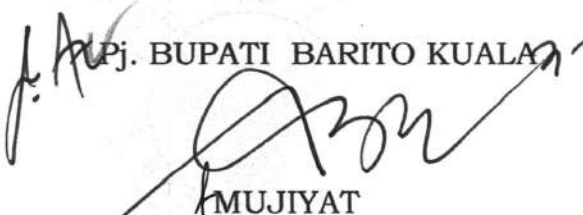
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Februari 2024

  
H. MUJIYAT  
BUPATI BARITO KUALA

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLISYADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 10

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 10 Tahun 2024  
 Tanggal 19 Februari 2024

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	480,994,000	144,298,200	192,397,600	144,298,200
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	475,009,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	475,009,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	586,509,000	175,952,700	234,603,600	175,952,700
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	513,038,000	153,911,400	205,215,200	153,911,400
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	535,316,000	160,594,800	214,126,400	160,594,800
15	TAMBAN	PURWOSARI II	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
16	TAMBAN	PURWOSARI I	548,942,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	482,649,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	541,302,000	162,390,600	216,520,800	162,390,600
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	574,538,000	172,361,400	229,815,200	172,361,400
21	TAMBAN	JELAPAT I	580,524,000	174,157,200	232,209,600	174,157,200
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	481,663,000	144,498,900	192,665,200	144,498,900
24	TAMBAN	SEKATA BARU	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
25	TAMBAN	KOANDA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
26	TAMBAN	DAMSARI	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
27	TAMBAN	SIDOREJO	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	598,942,000	179,682,600	239,576,800	179,682,600
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	573,345,000	172,003,500	229,338,000	172,003,500
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	495,081,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	536,971,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	598,911,150	179,673,345	239,564,460	179,673,345
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	495,081,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400

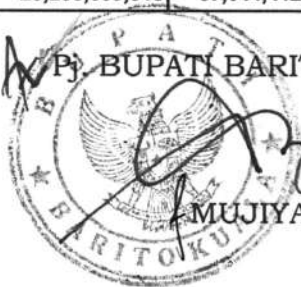


NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	542,956,000	162,886,800	217,182,400	162,886,800
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	586,971,000	176,091,300	234,788,400	176,091,300
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	579,331,000	173,799,300	231,732,400	173,799,300
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	482,649,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
61	ALALAK	PULAU ALALAK	502,260,000	150,678,000	200,904,000	150,678,000
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	482,649,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700
63	ALALAK	PULAU SUGARA	482,649,000	144,794,700	193,059,600	144,794,700
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	548,942,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	562,567,000	168,770,100	225,026,800	168,770,100
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
69	ALALAK	BELANDEAN	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	568,553,000	170,565,900	227,421,200	170,565,900
72	ALALAK	BERINGIN	562,567,000	168,770,100	225,026,800	168,770,100
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
74	ALALAK	PANCA KARYA	450,081,000	135,024,300	180,032,400	135,024,300
75	ALALAK	TATAH MESJID	496,274,000	148,882,200	198,509,600	148,882,200
76	MANDASTANA	TERANTANG	470,678,000	141,203,400	188,271,200	141,203,400
77	MANDASTANA	TANIPAH	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	524,023,000	157,206,900	209,609,200	157,206,900
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	542,956,000	162,886,800	217,182,400	162,886,800
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
84	MANDASTANA	LOKRAWA	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	495,081,000	148,524,300	198,032,400	148,524,300
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	470,678,000	141,203,400	188,271,200	141,203,400
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	548,942,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	529,331,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	529,331,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	548,942,000	164,682,600	219,576,800	164,682,600
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	462,052,000	138,615,600	184,820,800	138,615,600
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	556,582,000	166,974,600	222,632,800	166,974,600
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
101	BELAWANG	BELAWANG	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
102	BELAWANG	BAMBANGIN	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
103	BELAWANG	SUKARAMAI	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
105	BELAWANG	SAMUDA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
106	BELAWANG	PARIMATA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
108	BELAWANG	PATIH SELERA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
109	BELAWANG	KARANG BUAH	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
110	BELAWANG	BINAAN BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
113	CERBON	SUNGAI RASAU	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
115	CERBON	SAWAHAN	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
116	CERBON	BANTUIL	536,971,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300
117	CERBON	BADANDAN	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
118	CERBON	SEI TUNJANG	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
119	CERBON	SEI RAYA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	507,052,000	152,115,600	202,820,800	152,115,600
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
124	BAKUMPAI	BANITAN	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
125	BAKUMPAI	BATIK	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
128	KURIPAN	JAMBU BARU	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
129	KURIPAN	JAMBU	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
130	KURIPAN	KABUAU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
131	KURIPAN	JARENANG	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
132	KURIPAN	TABATAN	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
133	KURIPAN	KURIPAN	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
134	KURIPAN	TABATAN BARU	475,009,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700
135	KURIPAN	ASIA BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	567,360,000	170,208,000	226,944,000	170,208,000
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
142	TABUKAN	MUARA PULAU	519,023,000	155,706,900	207,609,200	155,706,900
143	TABUKAN	KARYA INDAH	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
146	TABUKAN	KARYA JADI	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
148	MEKARSARI	MEKARSARI	556,582,000	166,974,600	222,632,800	166,974,600
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	476,663,000	142,998,900	190,665,200	142,998,900
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	488,634,000	146,590,200	195,453,600	146,590,200
152	MEKARSARI	JELAPAT II	469,023,000	140,706,900	187,609,200	140,706,900
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	496,274,000	148,882,200	198,509,600	148,882,200
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
156	MEKARSARI	INDAH SARI	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
157	BARAMBAI	BARAMBAI	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	529,331,000	158,799,300	211,732,400	158,799,300



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				30%	40%	30%
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	439,096,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800
161	BARAMBAI	BAGAGAP	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
164	BARAMBAI	KARYA BARU	439,096,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	536,971,000	161,091,300	214,788,400	161,091,300
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	463,038,000	138,911,400	185,215,200	138,911,400
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
168	MARABAHAN	PENGHULU	511,374,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200
169	MARABAHAN	BAGUS	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
170	MARABAHAN	BALIUK	444,096,000	133,228,800	177,638,400	133,228,800
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	439,096,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	439,096,000	131,728,800	175,638,400	131,728,800
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
179	WANARAYA	TUMIH	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
180	WANARAYA	PINANG HABANG	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
182	WANARAYA	BABAT RAYA	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	511,374,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200
184	WANARAYA	SIDOMULYO	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	523,345,000	157,003,500	209,338,000	157,003,500
186	WANARAYA	SURYA KANTA	517,360,000	155,208,000	206,944,000	155,208,000
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	511,374,000	153,412,200	204,549,600	153,412,200
188	WANARAYA	DWIPASARI	445,081,000	133,524,300	178,032,400	133,524,300
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	451,087,900	135,326,370	180,435,160	135,326,370
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	451,067,000	135,320,100	180,426,800	135,320,100
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	475,009,000	142,502,700	190,003,600	142,502,700
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	501,067,000	150,320,100	200,426,800	150,320,100
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	457,052,000	137,115,600	182,820,800	137,115,600
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	507,052,000	152,115,600	202,820,800	152,115,600
JUMLAH			94,111,031,050	28,233,309,315	37,644,412,420	28,233,309,315


  
 BUPATI BARITO KUALA,
   
 MUJIYAT

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA									Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Penelitian
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Iwae)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula		
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	295,444,184	675	6	1,538	8	30.00	8	114.00	9	31	185,549,939	480,994,123	480,994,000
2	TABUNGANEN	SUNGAi TELAN BESAR	295,444,184	482	6	1,282	7	26.00	8	98.00	8	29	173,578,976	469,023,159	469,023,000
3	TABUNGANEN	SUNGAi TELAN KECIL	295,444,184	444	6	1,085	7	15.00	7	85.00	8	28	167,593,494	463,037,677	463,038,000
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	295,444,184	1,074	7	1,790	8	15.00	7	80.00	8	30	179,584,457	475,008,641	475,009,000
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	295,444,184	1,133	7	1,933	8	11.00	7	92.00	8	30	179,584,457	475,008,641	475,009,000
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	295,444,184	941	6	1,586	8	13.00	7	92.00	8	29	173,578,976	469,023,159	469,023,000
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	388,988,108	2,511	8	4,695	9	31.00	8	90.00	8	33	197,520,903	586,509,011	586,509,000
8	TABUNGANEN	SUNGAi TERAS DALAM	295,444,184	602	6	1,101	7	12.00	7	96.00	8	28	167,593,494	513,037,677	513,038,000
9	TABUNGANEN	SUNGAi JINGAH BESAR	295,444,184	351	6	666	6	12.00	7	82.00	8	27	161,608,012	457,052,195	457,052,000
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	361,737,203	432	6	1,045	7	3.00	6	79.00	8	27	161,608,012	523,345,214	523,345,000
11	TABUNGANEN	SEi TERAS LUAR	295,444,184	755	6	1,163	7	10.00	6	72.00	8	27	161,608,012	457,052,195	457,052,000
12	TABUNGANEN	SEi TELAN MUARA	295,444,184	279	6	807	6	10.00	6	82.00	8	26	155,622,530	451,066,714	451,067,000
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	295,444,184	630	6	1,525	8	25.00	7	85.00	8	29	173,578,976	469,023,159	469,023,000
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	361,737,203	968	6	1,825	8	27.00	8	48.20	7	29	173,578,976	535,316,178	535,316,000
15	TAMBAN	PURWOSARI II	361,737,203	549	6	1,404	7	9.00	6	80.00	8	27	161,608,012	523,345,214	523,345,000
16	TAMBAN	PURWOSARI I	375,362,555	536	6	2,267	8	15.75	7	51.00	8	29	173,578,976	548,941,631	548,942,000
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	309,059,536	1,118	7	2,233	8	3.40	6	52.00	8	29	173,578,976	482,648,612	482,649,000
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	361,737,203	1,014	7	1,769	8	20.00	7	57.00	8	30	179,584,457	541,301,680	541,302,000
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	295,444,184	1,031	7	2,445	8	5.40	6	59.00	8	29	173,578,976	469,023,159	469,023,000
20	TAMBAN	TINGGIRAN I LUAR	388,988,108	1,235	7	4,351	9	11.00	7	57.00	8	31	185,549,939	574,538,047	574,538,000
21	TAMBAN	JELAPATI	388,988,108	1,985	7	6,168	10	18.00	7	51.00	8	32	191,535,421	580,523,529	580,524,000
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	295,444,184	929	6	1,945	8	15.00	7	58.00	8	29	173,578,976	469,023,159	469,023,000

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembuatan
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jawa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	309,069,636	850	6	2,380	8	8,50	6	76,00	8	28	167,593,494	5,000,000	481,663,130	481,663,000
24	TAMBAN	SEKITA BARU	295,444,184	609	6	1,386	7	41,90	8	90,00	8	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
25	TAMBAN	KOANDA	295,444,184	437	6	1,073	7	8,00	6	79,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
26	TAMBAN	DAMSARI	295,444,184	521	6	1,067	7	8,50	6	81,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
27	TAMBAN	SIDOREJO	295,444,184	448	6	1,470	7	5,25	6	77,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	375,362,655	747	6	2,443	8	18,00	7	55,00	8	29	173,578,976	50,000,000	598,941,931	598,942,000
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	295,444,184	477	6	1,079	7	3,50	6	54,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	295,444,184	411	6	985	6	6,50	6	52,00	8	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	295,444,184	725	6	1,453	7	8,00	6	47,00	7	26	155,622,530	50,000,000	501,066,714	501,067,000
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	295,444,184	348	6	1,402	7	6,50	6	48,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	361,737,203	311	6	1,767	8	4,62	6	47,00	7	27	161,808,012	50,000,000	573,346,214	573,345,000
34	ANJIR PASAR	BANYIR	295,444,184	308	6	1,345	7	16,74	7	35,00	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	295,444,184	251	6	583	6	9,25	6	33,00	7	25	149,637,046	50,000,000	495,081,232	495,081,000
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	295,444,184	292	6	943	6	11,37	7	32,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	375,362,655	444	6	1,970	8	8,67	6	48,00	7	27	161,808,012		536,970,667	536,971,000
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	295,444,184	193	6	1,128	7	9,50	6	48,00	7	26	155,622,530	50,000,000	501,066,714	501,067,000
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASARII	295,444,184	328	6	1,288	7	11,25	7	60,00	8	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	295,444,184	402	6	1,504	8	11,25	7	70,00	8	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	375,362,655	473	6	2,263	8	11,00	7	51,00	8	29	173,578,976	50,000,000	598,941,631	598,911,150
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	295,444,184	192	6	615	6	3,75	6	46,00	7	25	149,637,046	50,000,000	495,081,232	495,081,000
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	295,444,184	193	6	603	6	3,00	6	35,00	7	25	149,637,046		445,081,232	445,081,000
44	ANJIR PASAR	BARUNA BARU	295,444,184	220	6	1,126	7	3,50	6	48,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
45	ANJIR PASAR	DANAU KARVA	295,444,184	185	6	669	6	7,60	6	37,00	7	25	149,637,046		445,081,232	445,081,000
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	295,444,184	806	6	2,005	8	4,00	6	55,00	8	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	375,362,655	870	6	2,724	9	5,00	6	48,00	7	28	167,593,494		542,956,149	542,956,000
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	295,444,184	521	6	941	6	7,50	6	52,00	8	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTATENGGAH	375,362,655	732	6	2,334	8	7,00	6	50,00	7	27	161,808,012	50,000,000	586,970,667	586,971,000
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	295,444,184	519	6	1,225	7	10,00	6	53,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	295,444,184	799	6	1,763	8	12,00	7	58,00	8	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	361,737,203	499	6	2,174	8	6,00	6	53,00	8	28	167,593,494	50,000,000	579,330,996	579,331,000
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PINGGU	295,444,184	680	6	1,351	7	4,00	6	33,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	295,444,184	773	6	1,584	8	12,00	7	53,00	8	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	295,444,184	542	6	984	6	7,50	6	55,00	8	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000



NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwe)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGU BARU	295,444,184	793	6	1,617	8	6,00	6	32,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	309,069,636	814	6	2,292	8	15,00	7	52,00	8	29	173,578,976		482,648,612	482,649,000
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARISAMA	295,444,184	312	6	621	6	9,50	6	56,00	8	26	155,622,530	50,000,000	501,086,714	501,067,000
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	295,444,184	553	6	1,334	7	5,00	6	47,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	295,444,184	336	6	1,256	7	6,25	6	51,00	8	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
61	ALALAK	PULAU ALALAK	322,695,089	1,519	7	3,172	9	1,21	6	52,00	8	30	179,564,457		502,259,546	502,260,000
62	ALALAK	PULAU SEMANGI	309,069,636	773	6	2,616	9	0,55	6	51,00	8	29	173,578,976		482,648,612	482,649,000
63	ALALAK	PULAU SUGARA	309,069,636	1,243	7	2,814	9	0,56	6	49,00	7	29	173,578,976		482,648,612	482,649,000
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	375,362,665	1,172	7	3,026	9	7,00	6	44,00	7	29	173,578,976		548,941,631	548,942,000
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	388,968,108	939	6	5,936	10	4,00	6	46,00	7	29	173,578,976		562,567,083	562,567,000
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	295,444,184	449	6	2,045	8	3,50	6	47,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
67	ALALAK	SUNGAI PTUNG	295,444,184	590	6	1,123	7	11,92	7	44,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	295,444,184	809	6	1,441	7	8,63	6	47,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
69	ALALAK	BELANDEAN	295,444,184	894	6	1,598	8	16,86	7	45,00	7	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	295,444,184	339	6	977	6	7,00	6	42,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	388,968,108	1,254	7	15,598	10	7,50	6	42,00	7	30	179,564,457		568,552,565	568,553,000
72	ALALAK	BERINGIN	388,968,108	1,254	7	3,346	9	5,50	6	45,00	7	29	173,578,976		562,567,083	562,567,000
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	295,444,184	480	6	1,756	8	3,50	6	44,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
74	ALALAK	PANCA KARYA	295,444,184	220	6	863	6	4,50	6	35,00	7	25	149,637,048	5,000,000	450,081,232	450,081,000
75	ALALAK	TATAH MESJID	322,695,089	1,306	7	4,022	9	3,50	6	46,00	7	29	173,578,976		466,274,064	466,274,000
76	MANDASTANA	TERANTANG	309,069,636	986	6	2,121	8	8,00	6	45,00	7	27	161,608,012		470,677,648	470,678,000
77	MANDASTANA	TANIPAH	295,444,184	518	6	1,038	7	6,50	6	36,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	295,444,184	1,048	7	1,718	8	10,50	7	50,00	7	29	173,578,976	55,000,000	524,023,159	524,023,000
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	295,444,184	348	6	1,458	7	12,05	7	45,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	375,362,665	436	6	2,040	8	18,00	7	35,00	7	28	167,593,494		542,956,149	542,956,000
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAYANG	295,444,184	631	6	782	6	11,00	7	40,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	295,444,184	680	6	970	6	12,00	7	44,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	361,737,203	507	6	1,978	8	10,00	6	35,00	7	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
84	MANDASTANA	LOKRAWA	295,444,184	735	6	1,282	7	8,00	6	42,00	7	26	155,622,530	50,000,000	501,066,714	501,067,000
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	295,444,184	354	6	583	6	5,00	6	38,00	7	25	149,637,048	50,000,000	495,081,232	495,081,000
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	295,444,184	362	6	755	6	12,00	7	45,00	7	26	155,622,530		451,086,714	451,067,000
87	MANDASTANA	ANTASAN SGERA	295,444,184	531	6	726	6	10,00	6	30,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	309,069,636	641	6	2,156	8	8,03	6	30,00	7	27	161,608,012		470,677,648	470,678,000

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembulatan
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwe)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	361.737.203	555	6	1.317	7	4.92	6	35.00	7	26	155.622.530		517.359.732	517.360.000
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	375.362.655	595	6	2.179	8	51.81	9	24.00	6	29	173.578.976		548.941.631	548.942.000
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	361.737.203	473	6	1.593	8	31.00	8	21.00	6	28	167.593.494		529.330.695	529.331.000
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	361.737.203	357	6	2.099	8	33.00	8	17.00	6	28	167.593.494		529.330.695	529.331.000
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	375.362.655	475	6	2.567	9	29.00	8	17.00	6	29	173.578.976		548.941.631	548.942.000
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	295.444.184	391	6	1.910	8	47.00	8	14.00	6	28	167.593.494		463.037.677	463.038.000
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	295.444.184	280	6	969	6	16.00	7	14.00	6	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	295.444.184	472	6	1.834	8	15.00	7	13.00	6	27	161.608.012	5.000.000	482.052.195	482.052.000
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	361.737.203	267	6	1.163	7	15.00	7	15.00	6	26	155.622.530		517.359.732	517.360.000
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	388.988.108	935	6	3.399	9	24.00	7	23.00	6	28	167.593.494		556.881.801	556.882.000
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	295.444.184	401	6	933	6	5.00	6	42.00	7	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	295.444.184	204	6	581	6	6.00	6	28.00	7	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
101	BELAWANG	BELAWANG	361.737.203	510	6	1.525	8	7.00	6	31.00	7	27	161.608.012		523.345.214	523.345.000
102	BELAWANG	BAMBANGIN	295.444.184	416	6	909	6	4.00	6	29.00	7	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
103	BELAWANG	SUKARAMAI	295.444.184	536	6	1.227	7	5.00	6	27.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	361.737.203	401	6	1.229	7	11.00	7	30.00	7	27	161.608.012		523.345.214	523.345.000
105	BELAWANG	SAMUDA	295.444.184	625	6	1.261	7	9.50	6	38.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
106	BELAWANG	PARIMATA	295.444.184	538	6	1.165	7	10.00	6	27.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	295.444.184	391	6	1.181	7	2.50	6	37.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
108	BELAWANG	PATH SEERA	295.444.184	603	6	1.803	8	6.50	6	34.00	7	27	161.608.012		457.052.195	457.052.000
109	BELAWANG	KARANG BUAH	295.444.184	271	6	813	6	2.50	6	35.00	7	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
110	BELAWANG	BINMAN BARU	295.444.184	616	6	1.122	7	6.00	6	30.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	295.444.184	609	6	1.267	7	5.25	6	41.00	7	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	295.444.184	248	6	1.431	7	32.00	8	7.00	6	27	161.608.012		457.052.195	457.052.000
113	CERBON	SUNGAI RASAU	295.444.184	226	6	1.184	7	28.00	8	12.00	6	27	161.608.012		457.052.195	457.052.000
114	CERBON	SIMPANG NUNGI	295.444.184	421	6	1.582	8	59.05	9	9.00	6	29	173.578.976		469.023.159	469.023.000
115	CERBON	SAMAHAN	295.444.184	391	6	1.048	7	19.05	7	9.00	6	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
116	CERBON	BANTUL	375.362.655	672	6	2.402	8	17.65	7	5.00	6	27	161.608.012		536.970.667	536.971.000
117	CERBON	BADANDAN	295.444.184	578	6	1.542	8	20.15	7	4.00	6	27	161.608.012		457.052.195	457.052.000
118	CERBON	SEI TUNJANG	295.444.184	178	6	596	6	17.50	7	9.00	6	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
119	CERBON	SEI RAYA	295.444.184	195	6	914	6	12.15	7	6.00	6	25	149.637.048		445.081.232	445.081.000
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	295.444.184	448	6	1.178	7	21.00	7	10.00	6	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	295.444.184	470	6	1.132	7	14.00	7	1.00	6	26	155.622.530		451.066.714	451.067.000

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwe)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	295,444,184	366	6	810	6	55,00	9	23,00	6	27	161,808,012	50,000,000	507,052,195	537,052,000
123	BAKUMPAI	BALIKUNG	295,444,184	234	6	967	6	45,00	8	27,00	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
124	BAKUMPAI	BANITAN	295,444,184	442	6	961	6	59,00	9	26,00	7	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
125	BAKUMPAI	BATIK	295,444,184	409	6	1,456	7	8,00	6	10,00	6	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	295,444,184	231	6	864	6	19,00	7	4,00	6	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
127	BAKUMPAI	SUNGA SELIRIK	295,444,184	192	6	519	6	18,00	7	2,00	6	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
128	KURIPAN	JAMBU BARU	295,444,184	369	6	584	6	84,00	10	41,00	7	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
129	KURIPAN	JAMBU	295,444,184	338	6	627	6	36,00	8	46,00	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
130	KURIPAN	KABUAU	295,444,184	386	6	680	6	24,00	7	49,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
131	KURIPAN	JARENANG	295,444,184	192	6	563	6	25,00	7	50,00	7	26	155,622,530		461,066,714	451,067,000
132	KURIPAN	TABATAN	295,444,184	411	6	880	6	35,00	8	62,00	8	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
133	KURIPAN	KURIPAN	295,444,184	411	6	729	6	22,50	7	56,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
134	KURIPAN	TABATAN BARU	295,444,184	494	6	1,002	7	70,50	9	64,00	8	30	179,564,457		475,008,641	475,009,000
135	KURIPAN	ASIA BARU	295,444,184	332	6	547	6	24,00	7	50,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	295,444,184	350	6	726	6	22,50	7	56,00	8	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	295,444,184	720	6	1,063	7	14,00	7	32,00	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	361,737,203	282	6	1,054	7	0,31	6	30,00	7	26	155,622,530	50,000,000	567,359,732	567,360,000
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	361,737,203	446	6	981	6	12,10	7	28,00	7	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	295,444,184	330	6	592	6	12,00	7	44,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	295,444,184	213	6	384	6	35,50	8	33,00	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
142	TABUKAN	MUARA PULAU	295,444,184	439	6	1,071	7	31,00	8	54,00	8	29	173,578,976	50,000,000	519,023,159	519,023,000
143	TABUKAN	KARYA INDAH	295,444,184	373	6	558	6	5,56	6	33,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	295,444,184	371	6	882	6	1,58	6	28,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
145	TABUKAN	KARYA MAMUR	295,444,184	792	6	1,521	8	24,65	7	24,00	6	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
146	TABUKAN	KARYA JADI	361,737,203	504	6	1,097	7	15,30	7	20,00	6	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	295,444,184	334	6	777	6	14,00	7	32,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
148	MEKARSARI	MEKARSARI	388,988,108	1,332	7	3,097	9	9,50	6	24,51	6	28	167,593,494		566,581,601	566,582,000
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	309,069,636	990	6	2,145	8	16,00	7	31,62	7	28	167,593,494		476,663,130	476,663,000
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	295,444,184	703	6	1,207	7	25,00	7	44,41	7	27	161,808,012		457,052,195	457,052,000
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	309,069,636	1,710	7	3,317	9	20,00	7	31,93	7	30	179,564,457		468,634,094	468,634,000
152	MEKARSARI	JELAPAT II	295,444,184	974	6	1,995	8	30,50	8	28,99	7	29	173,578,976		469,023,159	469,023,000
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	295,444,184	572	6	1,375	7	10,00	6	30,90	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	322,695,089	1,924	7	3,976	9	10,00	6	35,61	7	29	173,578,976		466,274,064	466,274,000



NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembelian
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwe)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	295,444,184	600	6	1,206	7	14,00	7	34,14	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
156	MEKARSARI	INDAH SARI	295,444,184	536	6	963	6	9,00	6	42,94	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
157	BARAMBAI	BARAMBAI	361,737,203	553	6	1,775	8	20,00	7	13,00	6	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	361,737,203	992	6	1,663	8	30,00	8	17,00	6	28	167,593,494		529,330,696	529,331,000
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	295,444,184	565	6	1,576	8	9,00	6	12,00	6	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	295,444,184	317	6	683	6	10,00	6	21,00	6	24	143,651,566		439,095,750	439,096,000
161	BARAMBAI	BAGGAP	295,444,184	709	6	1,544	8	32,00	8	16,00	6	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	295,444,184	671	6	1,242	7	8,00	6	15,00	6	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	295,444,184	615	6	1,569	8	7,00	6	10,00	6	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
164	BARAMBAI	KARYA BARU	295,444,184	245	6	630	6	7,00	6	23,00	6	24	143,651,566		439,095,750	439,096,000
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	375,362,655	610	6	2,497	8	16,00	7	13,00	6	27	161,608,012		536,970,667	536,971,000
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KAYAN	295,444,184	414	6	1,720	8	27,00	8	7,00	6	28	167,593,494		463,037,677	463,038,000
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KRIDALAM	361,737,203	533	6	1,997	8	17,00	7	13,00	6	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
168	MARABAHAN	PENGHULU	361,737,203	129	6	607	6	7,50	6	25,75	7	25	149,637,048		511,374,251	511,374,000
169	MARABAHAN	BAGUS	361,737,203	320	6	1,075	7	10,50	7	3,00	6	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
170	MARABAHAN	BALUK	295,444,184	114	6	607	6	5,00	6	3,00	6	24	143,651,566	5,000,000	444,095,750	444,096,000
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	295,444,184	419	6	1,160	7	24,19	7	12,00	6	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	295,444,184	481	6	1,030	7	28,00	7	17,00	6	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	361,737,203	318	6	1,040	7	28,86	8	17,00	6	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
174	MARABAHAN	SIDOMAKMUR	295,444,184	421	6	953	6	7,00	6	11,00	6	24	143,651,566		439,095,750	439,096,000
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	295,444,184	164	6	664	6	7,95	6	17,00	6	24	143,651,566		439,095,750	439,096,000
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	361,737,203	378	6	1,570	8	2,50	6	28,00	7	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	361,737,203	907	6	2,083	8	4,00	6	35,00	7	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	361,737,203	309	6	1,070	7	2,50	6	32,00	7	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
179	WANARAYA	TUMIH	295,444,184	362	6	921	6	4,50	6	38,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
180	WANARAYA	PINANG HABANG	361,737,203	371	6	1,076	7	2,50	6	39,00	7	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	295,444,184	315	6	764	6	2,50	6	39,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
182	WANARAYA	BABAT RAYA	295,444,184	268	6	678	6	2,50	6	36,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	361,737,203	221	6	971	6	3,50	6	27,00	7	25	149,637,048		511,374,251	511,374,000
184	WANARAYA	SIDOMULYO	361,737,203	479	6	1,721	8	3,50	6	29,00	7	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	361,737,203	513	6	2,058	8	2,00	6	30,00	7	27	161,608,012		523,345,214	523,345,000
186	WANARAYA	SURYA KANTA	361,737,203	522	6	1,394	7	2,50	6	45,00	7	26	155,622,530		517,359,732	517,360,000
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	361,737,203	337	6	942	6	2,50	6	39,00	7	25	149,637,048		511,374,251	511,374,000

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai	ALOKASI FORMULA										Alokasi Kinerja	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembulatan
				Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk (Jlwe)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula			
188	WANARAYA	DWIPASARI	296,444,184	281	6	672	6	2,50	6	42,00	7	25	149,637,048		445,081,232	445,081,000
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	296,444,184	620	6	822	6	15,00	7	36,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,900
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	296,444,184	488	6	997	6	16,00	7	36,00	7	26	155,622,530	50,000,000	501,066,714	501,067,000
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	296,444,184	316	6	389	6	18,00	7	38,00	7	26	155,622,530		451,066,714	451,067,000
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	296,444,184	480	6	1,092	7	120,00	10	39,00	7	30	179,564,457		475,008,641	475,009,000
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	296,444,184	829	6	1,239	7	10,00	6	31,00	7	26	155,622,530	50,000,000	501,066,714	501,067,000
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	296,444,184	727	6	1,374	7	12,00	7	29,00	7	27	161,608,012		457,052,195	457,052,000
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MULARA	296,444,184	875	6	1,370	7	12,00	7	38,00	7	27	161,608,012	50,000,000	507,052,195	507,052,000
Jumlah			61,578,454,251	111,834	-	302,786	-	2,884,79	-	7,745,01	-	5,264	31,507,576,799	1,025,000,000	94,111,031,050	94,111,031,050


  
 BUPATI BARITO KUALA,